



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKIP

LAPORAN INSTANSI KINERJA PEMERINTAH

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Bogor Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas publik dan wujud komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan kebencanaan, mitigasi risiko, serta pemulihan pascabencana di wilayah Kota Bogor

Laporan ini memuat capaian kinerja, realisasi program dan anggaran, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana di masa mendatang. Kami berharap materi yang disajikan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong sinergi lebih kuat untuk mewujudkan Kota Bogor yang tangguh dan aman dari ancaman bencana.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran BPBD Kota Bogor, instansi pemerintah daerah terkait, mitra kerja, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat yang telah memberikan data, dukungan, dan masukan konstruktif. Kontribusi semua pihak sangat berarti dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebencanaan sepanjang tahun 2025. Akhir kata, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan laporan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Bogor, Februari 2026

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor



Dimas Tiko Prahadisasongko, S.STP., M.Kesos.

Pembina Tk.I – IV/b

NIP. 198501172003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL i

DAFTAR GAMBAR i

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1 Latar Belakang..... 2

1.2 Maksud dan Tujuan 3

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor 4

1.4 Sumber Daya Manusia 8

1.5 Isu Strategi 9

1.6 Cascading Kinerja 10

1.7 Peta Proses Bisnis 11

1.8 Tindak Lanjut Atas LHE 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

2.1 Rencana Strategis 17

2.2 Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah..... 19

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja..... 20

2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2025 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 24

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 24

3.2 Akuntabilitas Keuangan 73

BAB IV PENUTUP 75

4.1 Kesimpulan..... 75

4.2 Saran..... 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jabatan Struktural dan Fungsional pada BPBD Kota Bogor	8
Tabel 1. 2	Status Kepegawaian pada Pegawai BPBD Kota Bogor	9
Tabel 1. 3	Tabel Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip	12
Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran dan Program	19
Tabel 2. 2	Tabel Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bogor Tahun 2025	20
Tabel 2. 3	Alokasi Anggaran BPBD Kota Bogor Tahun 2025	22
Tabel 2. 4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025	23
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	24
Tabel 3. 2	Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bogor pada tahun 2025	24
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah.....	27
Tabel 3. 4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Bogor	29
Tabel 3. 5	Sumber Anggaran Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor.....	31
Tabel 3. 6	Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah	32
Tabel 3. 7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100).....	34
Tabel 3. 8	Sumber Anggaran Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100).....	39
Tabel 3. 9	Laporan Inovasi Daerah	40
Tabel 3. 10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Kepatuhan Pengeloaan Keuangan.....	43
Tabel 3. 11	Sumber Anggaran Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor.....	47
Tabel 3. 12	Hasil Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BPBD	47
Tabel 3. 13	Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	48
Tabel 3. 14	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda.....	50
Tabel 3. 15	Sumber Anggaran Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	53
Tabel 3. 16	Hasil Penilaian TLHP BPK RI dan APIP Tahun 2025	54
Tabel 3. 17	Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	54
Tabel 3. 18	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	57
Tabel 3. 19	Sumber Anggaran Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor.....	62
Tabel 3. 20	Indikator Program dalm Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah	63
Tabel 3. 21	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Indeks Risiko Bencana	65

Tabel 3. 22 Sumber Anggaran Indeks Risiko Bencana Daerah..... 69

Tabel 3. 23 Indikator Program dalam Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko
Bencana 70

Tabel 3. 24 Akuntabilitas Keuangan Sasaran strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Bogor 71

Tabel 3. 25 Akuntabilitas Keuangan BPBD Kota Bogor Tahun 2024 73

Tabel 3. 26 Akuntabilitas Keuangan BPBD Kota Bogor..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPBD Kota Bogor..... 8

Gambar 3. 2 Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah..... 26

Gambar 3. 1 Tren Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada BPBD 28

Gambar 3. 3 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor Pada BPBD Kota Bogor..... 30

Gambar 3. 5 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) 33

Gambar 3. 4 Tren Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)..... 35

Gambar 3. 6 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)..... 37

Gambar 3. 8 Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 42

Gambar 3. 7 Tren Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 43

Gambar 3. 9 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor 45

Gambar 3. 11 Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda 49

Gambar 3. 10 Tren Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda..... 50

Gambar 3. 12 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda 52

Gambar 3. 14 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 56

Gambar 3. 13 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah 57

Gambar 3. 15 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah Pada BPBD Kota Bogor 60

Gambar 3. 17 Indeks Risiko Bencana 64

Gambar 3. 16 Indeks Risiko Bencana 65

Gambar 3. 18 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan Indeks Risiko Bencana 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Paradigma tersebut menegaskan pergeseran fokus penyelenggaraan pemerintahan dari sekadar kepatuhan administratif menuju pencapaian kinerja yang terukur dan bernilai guna. Prinsip ini selaras dengan konsep *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewajiban setiap perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pengelolaan kinerja secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa pelaporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional, pemerintah menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tematik, yang menekankan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Akuntabilitas kinerja menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, ditegaskan bahwa dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) difokuskan pada

penyajian capaian kinerja dan akuntabilitas hasil, serta tidak lagi memuat secara khusus visi dan misi kepala daerah, karena substansi tersebut telah tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan dan penajaman substansi dokumen kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan berbasis bukti (*evidence-based performance*).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, memiliki peran krusial dalam melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Kota Bogor sebagai wilayah dengan karakteristik geografis dan hidrometeorologis yang kompleks menghadapi potensi bencana yang relatif tinggi, sehingga menuntut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan didukung oleh pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BPBD Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bogor yang berlaku. Laporan ini juga disusun sebagai media informasi kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, guna menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta mengidentifikasi tantangan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pelaporan formal, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik di bidang kebencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Bogor dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian sasaran strategis, tujuan, serta misi organisasi, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya selama satu periode pelaporan. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil,

sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan terpercaya. Adapun tujuan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPBD Kota Bogor adalah:

1. Menjadi instrumen evaluasi kinerja internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bogor.
2. Mewujudkan transparansi kinerja yang terukur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menilai capaian kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, penguatan sistem kinerja, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bogor.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Pembentukan BPBD Kota Bogor bertujuan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sub urusan bencana dalam rangka penanggulangan bencana daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kota Bogor memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kota Bogor menyelenggarakan menyelenggarakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bedasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi BPBD Kota Bogor:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD secara sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan

2. Sekretariat

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, berikut ini tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Selain itu membantu Kepala Pelaksana dalam melakukan penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan. Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- c. mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang terdapat di lingkungan BPBD.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi BPBD Kota Bogor



Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebanyak 72 orang Berikut adalah jumlah berdasarkan kualifikasi sebagaimana tabel dibawah:

- 1) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 1. 1

Jabatan Struktural dan Fungsional pada BPBD Kota Bogor

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		JumlahSeluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	2	2	4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
Jumlah		3	2	5

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

2) Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1. 2
Status Pengelompokan Pegawai BPBD Kota Bogor

No	Seksi	Jumlah Pegawai	Jenis Pegawai				By Genre	
			PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh Waktu	Non ASN	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0
2	Sekretariat	12	6	1	5	0	6	6
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6	2	1	3	0	3	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	49	5	3	34	7	45	4
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	3	0	1	0	2	2
6	Total	72	17	5	43	7	57	15

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

1.5 Isu Strategi

Isu strategis yang dihadapi oleh BPBD Kota Bogor terkait dengan anggaran, kebijakan, dan sumber daya manusia (SDM). Isu-isu ini menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di tingkat daerah.

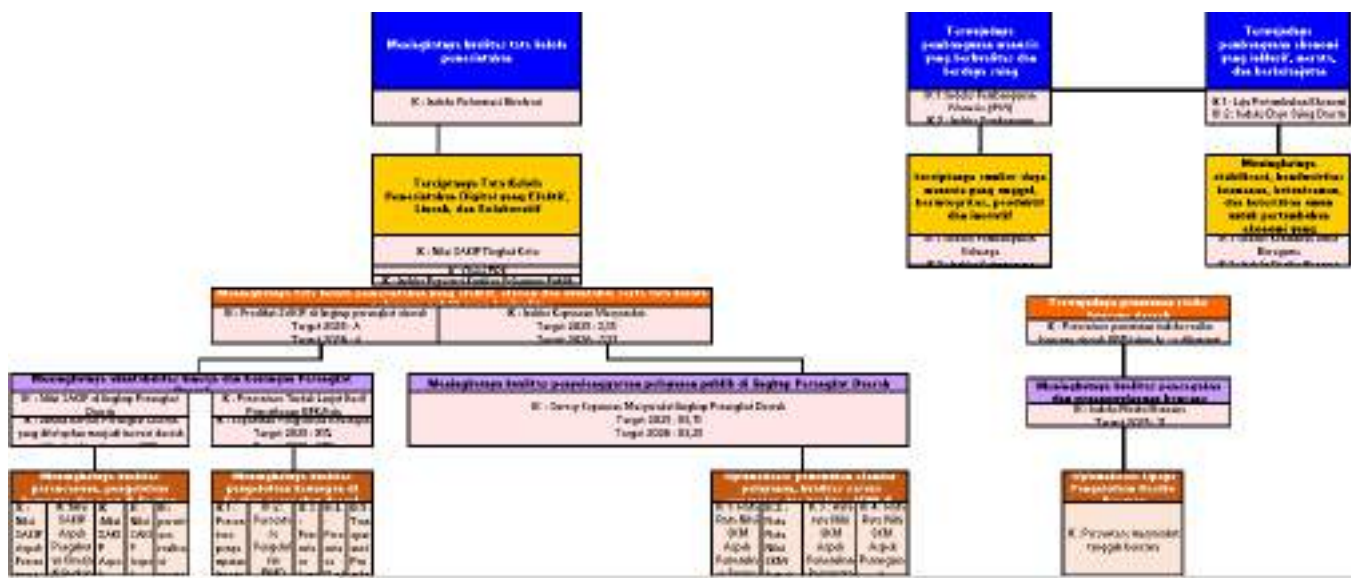
1. Belum optimalnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
2. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim;
3. Upaya mitigasi bencana, baik struktural maupun non struktural;
4. Penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan ke seluruh aspek masyarakat;

5. Penyediaan sumber daya yang belum memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
6. Penyediaan sistem operasi, pembinaan, dan penggerakan sumber daya untuk penanggulangan bencana yang cepat, efektif dan efisien;
7. Membangun kembali pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau build back better, safer and sustainable;
8. Optimalisasi peran pemerintah, masyarakat/komunitas dan penanggulangan bencana.

1.6 Cascading Kinerja

Sejalan dengan penerapan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, setiap Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Pokok dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor menyusun skema cascading kinerja sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Pohon Kinerja

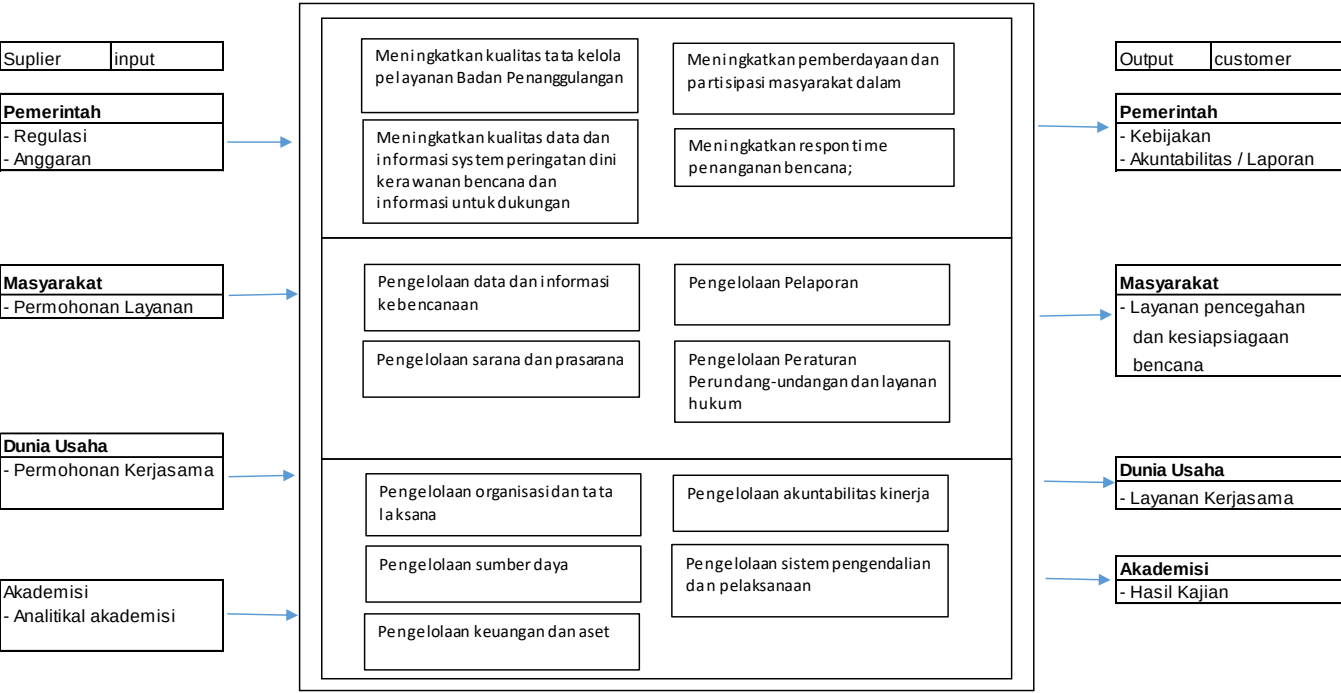


Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

1.7 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Cascading Kinerja BPBD, maka Peta Proses Bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor



Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

1.8 Tindak Lanjut Atas LHE

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025 yang menilai kinerja tahun 2024, seluruh rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti dengan baik. Adapun rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3
Tabel Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip

No	Kelemahan Atas Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Eviden	Status
1.	Evaluasi Perencanaan Kerja				
a.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai dengan baik, capaian kinerja sasaran dan anggaran sub kegiatan pada TW 1 tahun berjalan baru mencapai 38%	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan melakukan evaluasi kinerja untuk mencapai target yang ditetapkan serta mendokumentasikan dalam laporan pemantauan/evaluasi	Telah menyampaikan informasi secara rapat bersama staff	https://drive.google.com/drive/folders/1abyhpLfEpqpKWXk3yfgAyyteineOPu	S
b.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dapat dicapai (achievable), dimana dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dilingkungan Perangkat Daerah dari Target 82 hanya tercapai 79,27 dan Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam		- Tindak Lanjut Pelaksanaan dilakukan di Triwulan III - Monitoring dan Evaluasi - dilakukan Penyerapan Anggaran di Triwulan III	https://drive.google.com/drive/folders/1qidqe5PPYjhKsAIhNTK3SYCXsD48NR9Q	

	pengurangan risiko bencana dari target 100% hanya tercapai 86,11%				
2.	Evaluasi Pengukuran Kinerja				
a.	Data Kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja diharapkan dimana dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dilingkungan Perangkat Daerah dari target 82 hanya mencapai 79,27 dan Persentase partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dari target 100% hanya tercapai 86,11%	Melibatkan setiap unit/satuan kerja dalam pengukuran kinerja dengan cara mengundangi pada evaluasi target dan program yang dilaksanakan secara berkala serta memantau pemanfaatan hasil evaluasi tersebut dalam pencapaian target program tahun berkenaan	Tindak Lanjut Pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1LMGML2ZRA3ZxzesOJEdbZEcEZeYVFr81?usp=sharing	S

b.	Setiap Unit/Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dimana dari 2 (dua) Program yang ada masih beberapa indikator program belum tercapai targetnya		Telah melaksanakan hasil pengukuran kinerja kekurangan pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1Xo5dhIHpvCvRtzgxHJrlz2hYpIcZlkRh	
3. Evaluasi Pelaporan Kinerja					
a.	Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama Pimpinan	Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dan melibatkan seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam mendukung capaian kinerja yang ingin dicapai	Telah melaksanakan SOP yang bagian dari informasi dalam laporan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1s3cFagvI1YoMHgStU6T_GjKLCdDYumn	S
b.	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, dimana seluruh pegawai belum berkontribusi dalam mendukung capaian kinerja yang ingin dicapai	Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja, memonitoringnya secara berkala dan melakukan penyesuaian aktivitas dalam rangka mencapai kinerja	Telah melaksanakan laporan capaian kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1aYtLCJ9KfhfXEchLnTMBK3yx53vKqrkf	S
c.	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian	Melakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan	Melakukan RAPBD Perubahan terkait sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan	https://drive.google.com/drive/folders/1H7MGR3dKn1Dlu8JZNH-aMxObyRHD-Sn-	S

	penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya hal tersebut menyebabkan masih ada 2 (dua) Indikator Kinerja tidak mencapai target	n kinerja jika diperlukan	dan Evakuasi Korban Bencana		
d.	Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi, dengan melakukan rapat-rapat dan evaluasi kinerja secara berjenjang	Melaksanakan rapat dan evaluasi kinerja secara berjenjang dalam rangka mengimple mentasikan informasi dalam Laporan Kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi	Telah menyampaikan informasi secara rapat bersama staff	https://drive.google.com/drive/folders/1IQREZcrKlZrGsxmAPiAR1gde7oib1x3z	S
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Melakukan perbaikan pada Unsur Evaluasi Akuntabilitas Internal dengan cara memanfaatkan dan mengimple mentasikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara menyeluruh untuk perbaikan dan	Membuat rencana aksi	https://drive.google.com/drive/folders/19sJB5FdxQ40G7znhp60mCeKrr09HDu8Y	S

		peningkata n akuntabilita s kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja			
--	--	--	--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja yang menggambarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor melalui kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja, ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang mencakup berbagai aspek yang perlu dicapai dalam periode waktu tertentu. Proses penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan rencana kegiatan, sehingga keduanya dapat saling mendukung dan berkoordinasi. Selain itu, penyusunan rencana kinerja ini juga merupakan bentuk komitmen yang jelas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, sebagai upaya memastikan bahwa semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Periode penyusunan RPD Kota Bogor 2025-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 sehingga dalam perencanaanya tidak terdapat misi walikota melainkan hanya sasaran dan tujuan, yang merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah:

“Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”

Untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor tersebut, dapat ditempuh melalui misi pembangunan sebagai tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor berikut pada Tujuan 2 RPD Kota Bogor 2025-2026 :

Tujuan RPD	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Indikator Tujuan RPD	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Indikator Sasaran RPD	Nilai SAKIP Tingkat Kota Opini BPK Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		
Tujuan RENSTRA PD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		
Indikator Tujuan RENSTRA PD	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat		
Sasaran RENSTRA PD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		
Indikator Sasaran RENSTRA PD	<table> <tr> <td> Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Kepatuhan Pengeloaan Keuangan </td><td> Survey Masyarakat Kepuasan lingkup Perangkat Daerah </td></tr> </table>	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Survey Masyarakat Kepuasan lingkup Perangkat Daerah
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Survey Masyarakat Kepuasan lingkup Perangkat Daerah		
Tujuan RPD	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan		
Indikator Tujuan RPD	Terwujudny a penurunan risiko bencana daerah Indeks Daya Saing Daerah		
Sasaran RPD	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		
Indikator Sasaran RRD	Indeks Resiko Bencana Daerah		

Tujuan RENSTRA PD	Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah
Indikator Tujuan Renstra PD	Persentase penurunan indeks resiko bencana daerah
Sasaran RENSTRA PD	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana
Indikator Sasaran RENSTRA PD	Indeks Risiko Bencana

2.2 Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025 memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran guna mendukung pencapaian Tujuan 2 Kota Bogor. Penjabaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang mendukung tercapainya kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	
Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan bentuk pelaksanaan amanah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur perjanjian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja adalah komitmen resmi untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

BPBD Bogor telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra BPBD Kota Bogor dan RPD Kota Bogor Tahun2025-2026. Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 2
Tabel Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bogor Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	83,2
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100
		Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	85,70
3	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	58,03
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	25,08
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai	26,55
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	Nilai	12,48

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	Nilai	21,97
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko dilingkungan perangkat daerah	Persen	100
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100
		Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Persen	94
		Persentase kepatuhan penganggaran	Persen	100
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Persen	95
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	94
6	Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87,11
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88,75
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	88,38
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	88,38
7	Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	Persentase	5
		Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persentase	20

Perjanjian kinerja BPBD Kota Bogor Tahun 2023 diimplementasikan ke dalam 2 (dua) program dengan rincian persasaran sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2. Program Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - b. Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025, melalui 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 9,153,552,437, berikut ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Alokasi Anggaran BPBD Kota Bogor Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Anggaran
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 8.794.719.237
5	1	1	Belanja Pegawai	Rp. 3.619.102.414
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.175.616.823
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 358.833.200
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 163.974.200
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 194.859.000
			Jumlah Belanja	Rp. 9.153.552.437
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 9.153.552.437)

Sumber Data: SIPD

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025

Sasaran	Anggaran	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	7.189.354.237	APBD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		APBD
Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	1.964.198.200	APBD

Sumber Data : BPBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanngulangan Bencana Daerah Kota Bogor dengan Wali Kota Bogor Tahun 2025. Pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dapat dilihat dari skala tabel

Tabel 3. 1

Skala Nilai Peringkat Kerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 .	91% ≤ 100% Sangat Baik	Sangat Baik
2 .	76% ≤ 90% Tinggi	Tinggi
3 .	66% ≤ 75% Sedang	Sedang
4 .	51% ≤ 65% Rendah	Rendah
5 .	≤ 50% Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No.87 Tahun 2017

Pada RPD Tahun 2025-2026, BPBD Kota Bogor berperan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya pada aspek penanggulangan bencana. Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bogor pada tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menggapai capaian kinerja.

Tabel 3. 2

Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bogor pada tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat	Nilai	83,2	83,2	71,69	75,15	80.85	97,18

	Daerah							
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95	95	N/A	N/A	69.1	72,74
3	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91	100	100	100	90	90
4	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75	85,70	88.89	85,62	88.81	103,63
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)	Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	NA	NA	-	0,00
6	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	0,79	58.03	63.49	58,03	54.59	106,302

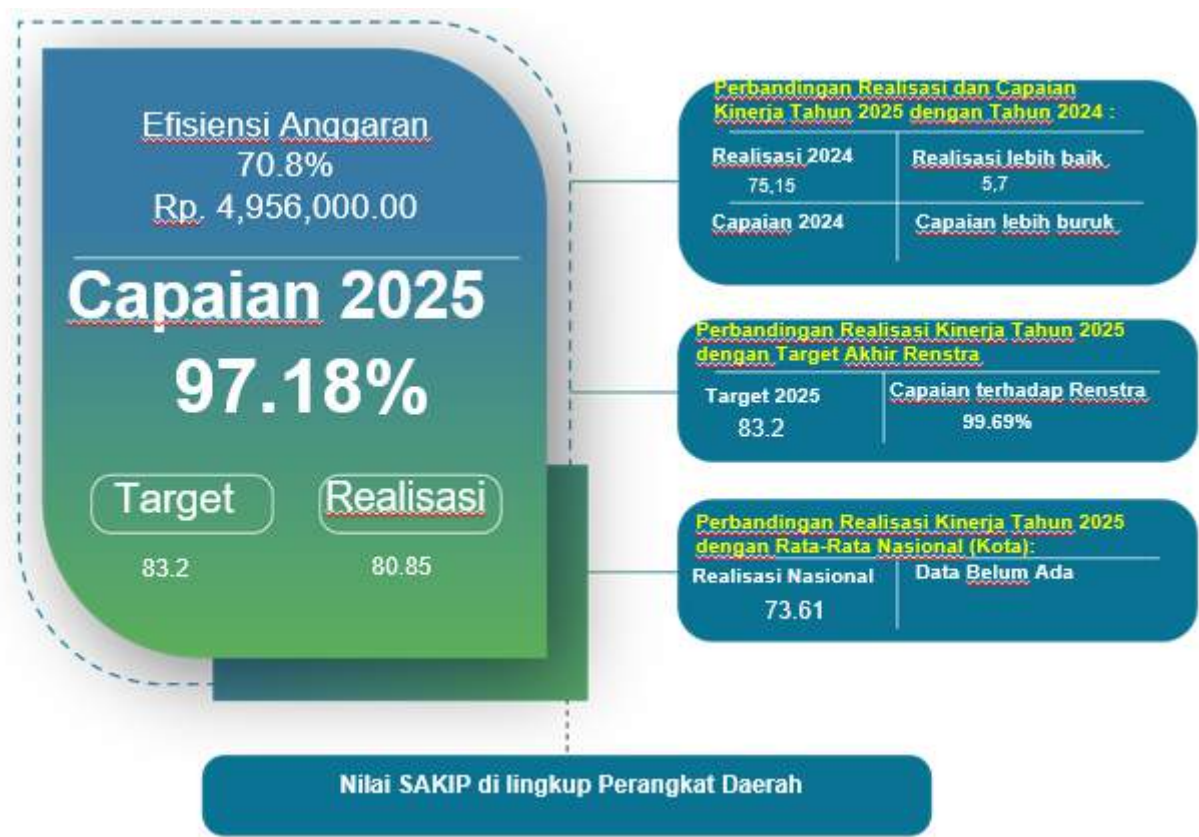
ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Berikut ini, capaian kinerja utama tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai berikut :

Sasaran RPD : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Sasaran Strategis RPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (IK: Nilai SAKIP Lingkup Perangkat

Gambar 3. 1
Nilai SAKIP Lingkup Peran gkat Daerah



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian terpadu yang terdiri atas berbagai kegiatan, instrumen, dan mekanisme yang disusun untuk menetapkan serta mengukur kinerja, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, hingga menyajikan laporan kinerja pada instansi pemerintah. Sistem ini diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam evaluasi implementasi SAKIP, terdapat empat aspek utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu perencanaan

kinerja dengan bobot 30 persen, pengukuran kinerja sebesar 30 persen, pelaporan kinerja sebesar 15 persen, serta evaluasi akuntabilitas kinerja dengan bobot 25 persen.

Sejalan dengan kerangka penilaian tersebut, salah satu indikator kinerja yang digunakan adalah Peningkatan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pada aspek pencapaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, penilaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. BPBD Kota Bogor ditargetkan memperoleh predikat kategori A dengan capaian nilai sebesar 80,5. Capaian tersebut menggambarkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan secara efektif, didukung oleh perencanaan kinerja yang terukur, sistem pengukuran kinerja yang andal, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada peningkatan hasil dan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Akuntabilitas kinerja di BPBD Kota Bogor memberikan daya dukung dalam meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor. Adapun capaian indeks Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 dengan capaian kinerja 97.18% dari target sebesar 83.2 dan terealisasi sebesar 80.85.

Tabel 3. 3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,2	83,2	80.85	97,18

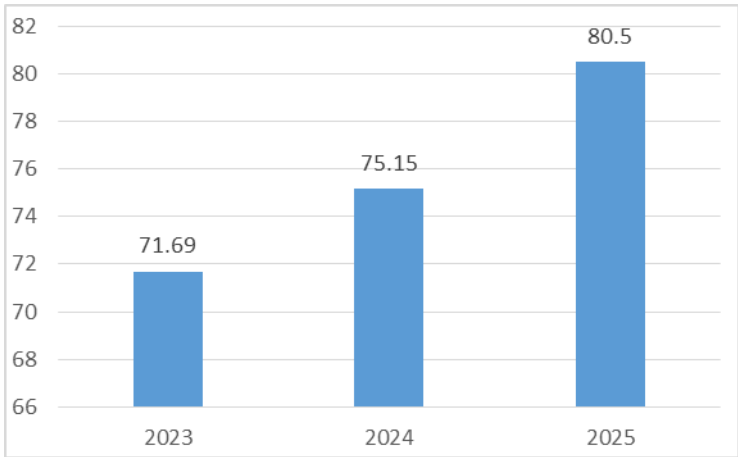
Namun demikian, pada indikator sasaran tersebut BPBD Kota Bogor belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, target nilai SAKIP yang ditetapkan sebesar 83,2, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah 80,5. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada indikator Peningkatan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah mencapai 96,75 persen, sehingga indikator

tersebut dikategorikan belum tercapai. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, khususnya dalam penguatan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, agar capaian nilai SAKIP pada periode selanjutnya dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3. 2
Tren Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada BPBD



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada BPBD mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, nilai tersebut tercatat sebesar 71.69, kemudian meningkat menjadi 75.15, pada tahun 2024, dan mencapai 80.5 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara menyeluruh dan berkesinambungan BPBD Kota Bogor semakin membaik serta mendekati tercapainya pelayanan publik yang optimal. Namun demikian, bahwa analisis tren tersebut hanya dapat membandingkan realisasi capaian antar tahun, dan belum dapat dibandingkan dengan target kinerja, karena indikator Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah sebelumnya belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada periode terdahulu.

Realisasi Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor sebesar 80.85 artinya BPBD Kota Bogor mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Pada Aspek realisasi, Nilai SAKIP Lingkup BPBD Kota Bogor meningkat sebesar 5,7 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar poin 75,15 dan tahun 2025 sebesar 80,85 poin.

Tabel 3. 4
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Bogor

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,60	10,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	17,25	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,15	80,85
			BB	A

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator nilai sakip tetap digunakan sebagai Indikator program dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 80.85 dan target akhir renstra sebesar 81.10 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 99.69%.

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain**

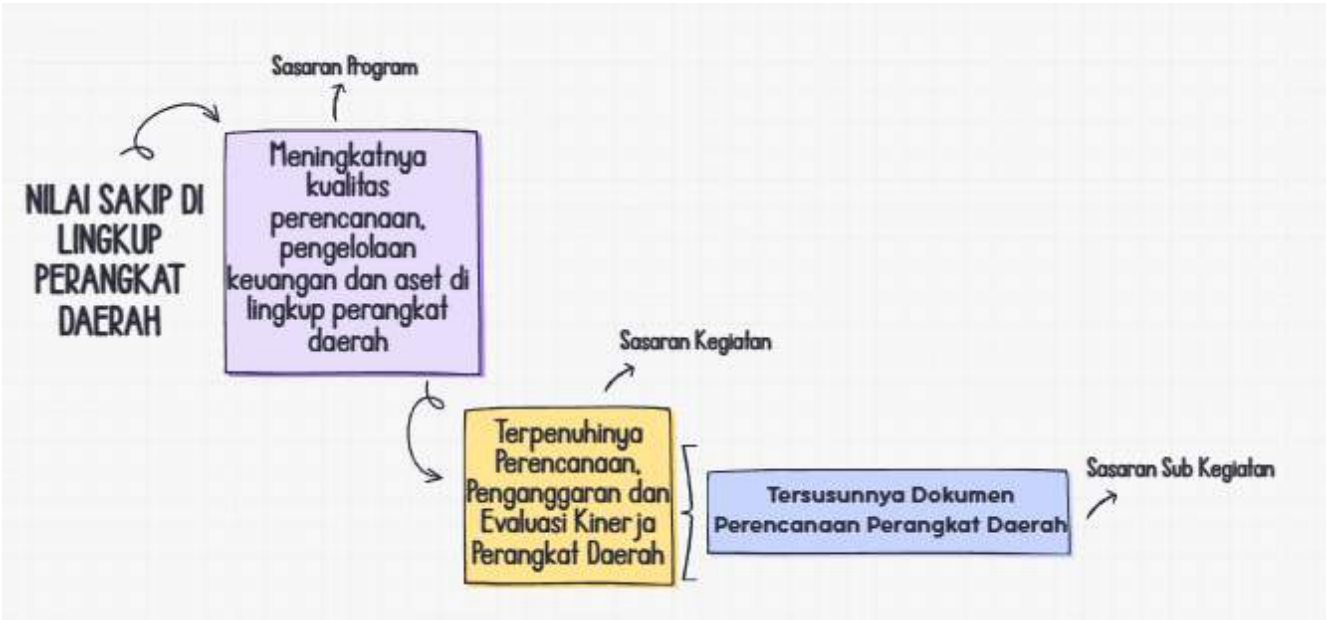
Jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, realisasi nilai sakip BPBD 80.10 menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi nilai sakip dengan Tingkat Nasional tercatat 73.61 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas BPBD relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan**

Keberhasilan peningkatan target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 80.85 dengan capaian 97.18% didukung oleh Nilai SAKIP Aspek

Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah, dan perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah, adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada BPBD Kota Bogor, antara lain Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah dengan Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan didukung oleh Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan upaya menyusu dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah serta evaluasinya (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjankin, Cascading Kinerja, LKJIP, LKPJ, LPPD, SPM, Monev Renja, Monev IKU dan IKK). berikut ini Faktor yang mendukung Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor pada BPBD kota Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 3
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Nilai SAKIP
Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor Pada BPBD Kota Bogor



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Pada tahun 2025 Indikator Program yang mendukung Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah rata rata tidak mencapai target hal ini karena disebabkan target kinerja perencanaan belum seluruhnya dapat dicapai, setiap seksi belum sepenuhnya memahami serta memiliki kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian, serta rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerjaDalam Rangka Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah diperlukan perbaikan dan oprimalisasi kinerja antara lain:

1. Melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan perjanjian kinerja agar target kinerja lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.
2. Melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya dalam hal penetapan indikator.
3. Melaksanakan rapat bersama pimpinan secara berkala dengan memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi capaian kinerja secara periodic.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara sistematis dan terencana, serta menjadikannya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target serta dapat dilakukan perbaikan secara cepat apabila terdapat deviasi capaian.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini merupakan Efisiensi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Sumber Anggaran Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
5-1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.2
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.2

Sumber: BPBD Kota Bogor

Target dalam Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran namun, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama di BPBD Kota Bogor

yaitu dari pagu anggaran 7,000,000.00 terealisasi sebesar 2,044,000.00 sehingga tersisa pagu anggaran sebesar 4,956,000.00 dari jumlah total anggaran tersebut, dapat diketahui capaian anggran yang mendukung dalam peningkatan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor yakni 29.20 %.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Diketahui faktor-faktor yang telah meningkatkan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kota Bogor Pada BPBD, Capaian sasaran dalam Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah

No	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
1.	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	25,20	25.8	25,20	97.67
2.	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	23,10	26.55	24,30	91.53
3.	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	9,60	12.48	10,35	82.93
4.	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	17,25	21.97	21,00	95.58
5.	perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	100	100.00

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Sasaran RPD : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Sasaran Strategis PD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (IK: Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100))

Gambar 3. 4
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini menggambarkan kuantitas inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan pengembangan, penerapan, evaluasi, serta menunjukkan tingkat keberlanjutan dan dampak yang terukur. Tingkat kematangan inovasi dinilai berdasarkan 20 indikator. Inovasi dinyatakan memenuhi kriteria apabila mencapai skor kumulatif minimal 100, yang menunjukkan bahwa inovasi tersebut telah berada pada kategori matang dan layak sebagai praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Jumlah inovasi Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan pada 20 indikator ≥ 100 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena mencerminkan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kebencanaan di Kota Bogor secara terukur dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika risiko bencana BPBD tidak hanya melaksanakan tugas secara administratif, tetapi juga mampu

menghadirkan inovasi yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penilaian tingkat kematangan inovasi berdasarkan 20 indikator dengan nilai minimal 100 memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan telah melalui proses perencanaan yang sistematis, memiliki dasar regulasi yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat diukur.

Pada tahun 2025, realisasi Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) mencapai 0 dari target yang ditetapkan sebesar 1 inovasi sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 0%.

Tabel 3. 7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)	Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	NA	NA	-	0,00

Namun demikian, pada indikator sasaran tersebut BPBD Kota Bogor belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, target Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) yakni 1 inovasi, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 0. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) mencapai 0, sehingga indikator tersebut dikategorikan belum tercapai.

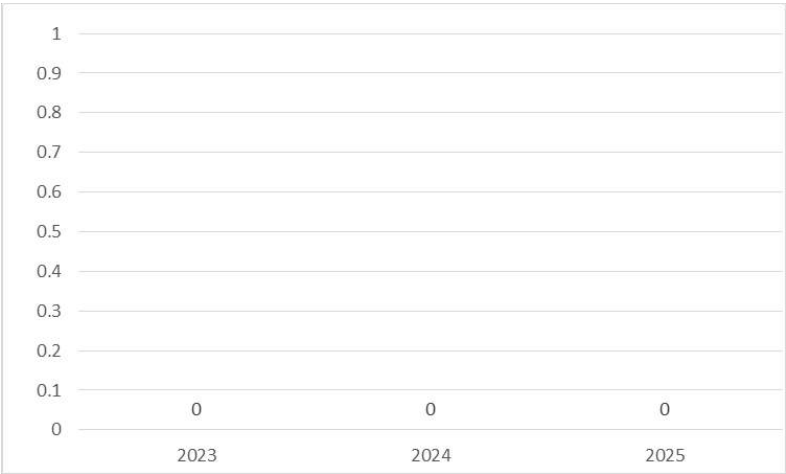
Tidak tercapainya indikator inovasi yakni Peta Digital BPBD disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh persyaratan terkait pengukuran dan pelaporan inovasi daerah. Secara nasional, pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri dan mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan inovasi daerah melalui mekanisme pengukuran IID dengan tingkat kematangan minimal 100. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi

dasar penetapan inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah, sebagai salah satu komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, inovasi Peta Digital BPBD belum sepenuhnya memenuhi indikator kematangan yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai kematangan inovasi belum mencapai batas minimal yang ditetapkan, sehingga inovasi Peta Digital BPBD belum dapat diakui dalam pengukuran IID dan berdampak pada tidak tercapainya indikator inovasi yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3. 5
Tren Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) bahwa jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai inovasi daerah dengan tingkat kematangan minimal 100 memperoleh capaian 0, karena belum memenuhi 20 indikator penilaian kematangan inovasi sebagaimana dipersyaratkan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan belum terpenuhinya seluruh indikator tersebut, inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah yang memenuhi kriteria kematangan minimal 100. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan

menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) tetap digunakan sebagai Indikator kinerja utama dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 1 Inovasi dan target akhir renstra sebesar 1 Inovasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 0 %.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain

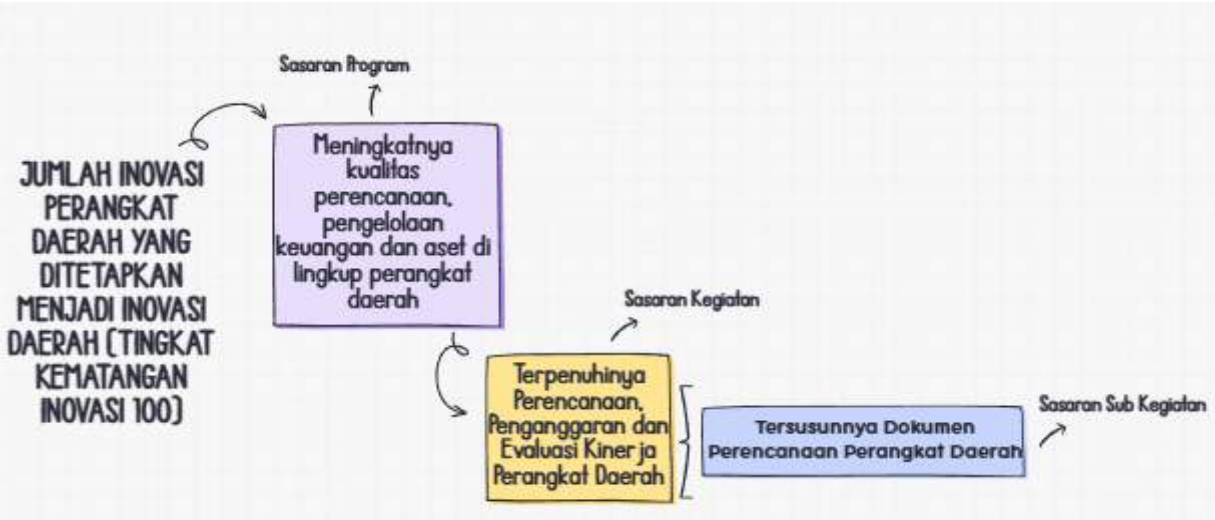
Karena indikator ini tidak digunakan secara nasional dan hanya berlaku di Kota Bogor, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak memungkinkan untuk dilakukan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan

Target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 0 Inovasi dengan capaian 0% didukung oleh Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah, persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah. adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah pada BPBD Kota Bogor, adapula upaya yang telah dilaksanakan antara lain Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah dengan didukung oleh Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan didukung oleh indikator selanjutnya karena Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan upaya menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah serta evaluasinya (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjin, Cascading Kinerja, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP), LKPJ, LPPD, SPM, Monev Renja, Monev IKU dan IKK) indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) mendukung dalam Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) dan dokumen evaluasi perangkat daerah karena merupakan indikator sasaran kinerja Perangkat daerah. berikut ini Faktor yang mendukung Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang

ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) BPBD kota Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 6
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)



Sumber Data : BPBD Kota Bogo

Pada tahun 2025 Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) tidak mencapai target hal ini karena disebabkan tidak memenuhi Indikator inovasi, anantara lain yang tidak tersedia yakni Regulasi Inovasi Daerah, Replikasi, Pedoman Teknis, Pelaksana Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Layanan Terintegrasi, Kecepatan penciptaan inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah. Penyebab dari tidak tersedianya indikator diatas dapat dilihat dari faktor berikut:

1. Belum tersedianya regulasi khusus yang menetapkan Peta Digital BPBD sebagai inovasi daerah secara resmi.
2. Belum adanya pedoman teknis tertulis yang mengatur tata cara pengelolaan, pemutakhiran data, pemanfaatan, serta mekanisme operasional Peta Digital BPBD, sehingga aspek standar operasional belum terdokumentasi.
3. Belum ditetapkannya pelaksana inovasi secara administratif, termasuk tim pengelola atau penanggung jawab yang memiliki uraian tugas dan fungsi yang jelas dalam pengembangan serta pemeliharaan sistem peta digital.

4. Belum dilakukan replikasi inovasi, baik pada perangkat daerah lain maupun pengembangan ke wilayah atau fitur layanan yang lebih luas, sehingga belum memenuhi unsur pengembangan dan keberlanjutan inovasi.
5. Belum optimalnya integrasi layanan, di mana Peta Digital BPBD belum sepenuhnya terhubung dengan sistem layanan pengaduan masyarakat.
6. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi inovasi secara berkala, termasuk pengukuran kinerja, tingkat pemanfaatan, serta dampak penggunaan peta digital terhadap peningkatan pelayanan kebencanaan.
7. Belum dilaksanakannya pengukuran kemanfaatan dan kualitas inovasi secara terstruktur.
8. Sosialisasi inovasi yang belum optimal, sehingga tingkat pemanfaatan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan masih terbatas.
9. Proses pengembangan yang belum sepenuhnya sistematis dan terdokumentasi.

Dalam Rangka Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan regulasi resmi berupa Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau regulasi lain yang menetapkan Peta Digital BPBD sebagai inovasi daerah secara formal.
2. Menyusun pedoman teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata kelola, pemutakhiran data, mekanisme operasional, pemanfaatan, serta pengembangan sistem Peta Digital BPBD secara terdokumentasi.
3. Menetapkan tim atau pelaksana inovasi secara administratif, lengkap dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan serta pengembangan peta digital.
4. Melakukan pengembangan dan replikasi inovasi, baik melalui perluasan fitur layanan, integrasi dengan perangkat daerah lain, maupun penerapan di wilayah atau sektor yang lebih luas untuk memenuhi aspek keberlanjutan serta memanfaatkan Kelurahan Tangguh Bencana untuk mengakses peta digital untuk turut membantu pendataan kejadian bencana.
5. Mengintegrasikan Peta Digital BPBD dengan sistem layanan pengaduan masyarakat dan sistem informasi kebencanaan lainnya, sehingga tercipta layanan yang terpadu dan responsif.
6. Menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Melakukan pengukuran kemanfaatan dan kualitas inovasi secara terstruktur dan berbasis data, sehingga dapat dibuktikan efektivitas, efisiensi, serta nilai tambah yang dihasilkan.
- Meningkatkan sosialisasi dan publikasi inovasi, baik melalui media sosial, website resmi, forum koordinasi, maupun kegiatan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Membangun sistem pengembangan inovasi yang sistematis dan terdokumentasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengembangan berkelanjutan sesuai dengan kriteria pengukuran inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini merupakan Efisiensi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Sumber Anggaran Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
5-1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.2
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.2

Sumber: BPBD Kota Bogor

Target dalam Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran namun, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama di BPBD Kota Bogor yaitu dari pagu anggaran 7,000,000.00 terealisasi sebesar 2,044,000.00 sehingga tersisa pagu anggaran sebesar 4,956,000.00 dari jumlah total anggaran tersebut, dapat diketahui capaian anggran yang mendukung Indikator tersebut yakni 29.20 %.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai inovasi daerah dengan tingkat kematangan inovasi minimal 100 menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi yang dikembangkan dan diteroboskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor belum sepenuhnya memenuhi 20 indikator penilaian kematangan inovasi yang telah ditetapkan dalam mekanisme evaluasi inovasi daerah. Dengan demikian, inovasi yang dilaksanakan masih memerlukan penguatan dari sisi kelengkapan administrasi, substansi, implementasi, maupun pengukuran dampaknya agar dapat memenuhi standar penilaian yang dipersyaratkan dan diakui sebagai inovasi daerah yang matang.

Capaian Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai inovasi daerah dengan tingkat kematangan inovasi minimal 100 tahun 2025 kurang dari target akhir Rencana Strategis yaitu sebesar 1 Inovasi dari target akhir renstra dan terealisasi 0 pada tahun 2025 Penjelasan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Laporan Inovasi Daerah

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tim Pengelola Aplikasi Peta Digital Kebencanaan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	DPA Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	peta digital kebencanaan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Laporan Akhir Kegiatan Pembuatan Peta Digital Kebencanaan
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	RKPD 2023 Kota Bogor
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Pengelola Aplikasi Peta Digital Kebencanaan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis	Tidak Tersedia

		berupa buku dalam bentuk elektronik	
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pengenalan Fitur Peta Digital Kebencanaan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Aplikasi Peta Digital Kebencanaan
15.	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Sasaran RPD: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Sasaran Strategis: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi yang handal (IK: Kepatuhan Pengelolaan Keuangan)

Gambar 3. 7
Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penilaian atas Kepatuhan Pengelolaan Keuangan akan menunjukkan seberapa patuh suatu instansi dalam melaksanakan aktivitas keuangan, meliputi aspek Kepatuhan penganggaran, Realisasi anggaran terhadap DPA, Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, Pengelolaan BMD, dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan kerangka penilaian tersebut, salah satu indikator kinerja yang digunakan adalah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada aspek pengelolaan keuangan daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bogor, penilaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang kurang baik. BPBD Kota Bogor mernargetkan nilai

sejumlah 95 namun memperoleh nilai 69,1 dengan capaian nilai sebesar 72,74. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3. 10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Kepatuhan Pengeloan Keuangan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95	95	N/A	N/A	69.1	72,74

Sumber: BPBD Kota Bogor

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 3. 8
Tren Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa tren Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada BPBD Kota Bogor belum dapat disandingkan atau dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan merupakan indikator baru yang penilaiannya dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dengan demikian, belum tersedia data historis sebagai pembanding untuk menilai perkembangan kinerja secara

longitudinal. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh pada tahun berjalan dijadikan sebagai baseline awal dalam pengukuran kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada tahun-tahun selanjutnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 100. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 69.10 %.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain;

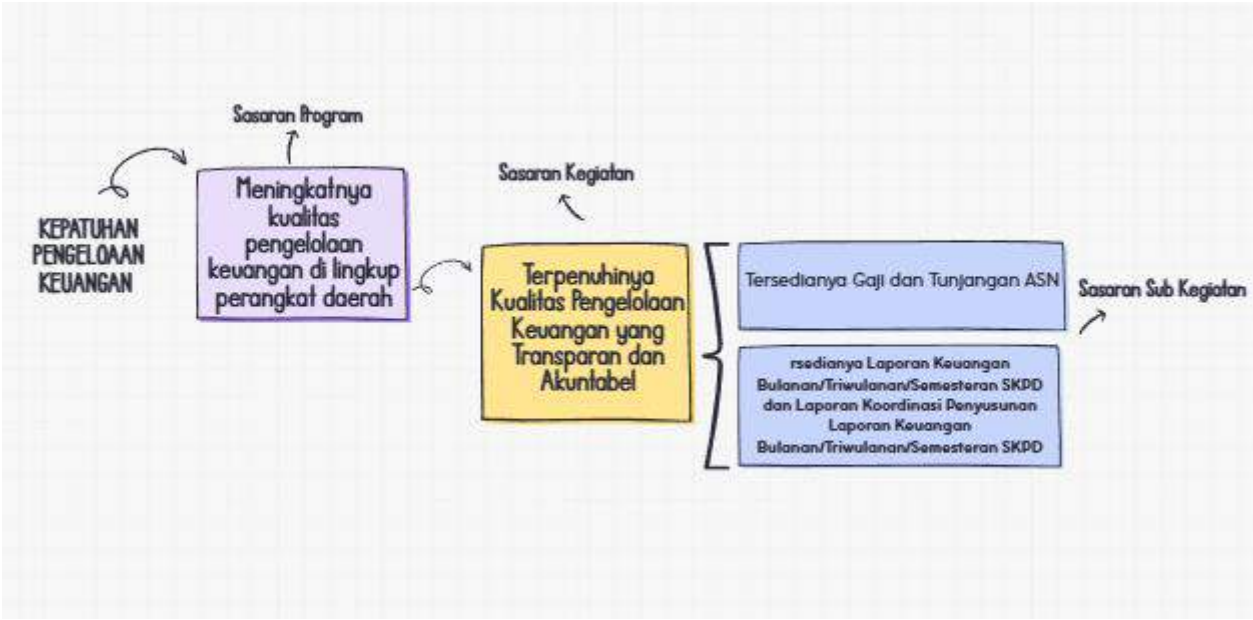
Karena indikator ini tidak digunakan secara nasional dan hanya berlaku di Kota Bogor, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak memungkinkan untuk dilakukan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan

Target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 69.1 dengan capaian 72.74% didukung oleh Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah dengan Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel serta terpenuhi Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di lingkup perangkat daerah, Persentase kepatuhan penganggaran, Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah . adapula upaya yang telah dilaksanakan antara lain Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, berikut ini Faktor yang mendukung Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada BPBD kota Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 9

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Kepatuhan
Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor**



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Gambar diatas diketahui faktor-faktor yang telah meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD, Capaian sasaran dalam Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah dikudukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2025, indikator program yang mendukung Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah rata-rata belum mencapai target. Kondisi ini disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diakibatkan oleh tidak dapat diaksesnya website BPBD Kota Bogor serta adanya kendala teknis pada sistem. Akibatnya, publikasi dokumen keuangan daerah tidak dapat dilakukan sehingga nilai indikator BPBD tidak dapat ditampilkan atau tercatat sebesar 0.

Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui perbandingan antara jumlah dokumen keuangan daerah yang dipublikasikan pada website Perangkat Daerah meliputi RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, dan LRA dengan jumlah dokumen keuangan yang seharusnya dipublikasikan, kemudian dikalikan 100 persen. Namun demikian, karena website BPBD tidak dapat diakses, maka kewajiban publikasi dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal

Selanjutnya, Persentase Kepatuhan Penganggaran, yang mencerminkan kesesuaian antara program dalam RKPD dengan PPAS serta kesesuaian program KUA-PPAS dengan APBD, Indikator ini belum mencapai target dengan nilai capaian sebesar 65. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam proses penyelarasan

dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya akibat penyesuaian kebijakan dan perubahan anggaran pada tahun berjalan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan penganggaran yang ditetapkan

Faktor kegagalan selanjutnya pada indikator Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA disebabkan oleh karakteristik anggaran BPBD yang bersifat mendesak dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kejadian bencana. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran, khususnya dalam penanganan rumah terdampak bencana yang memerlukan penyediaan hunian sementara, sehingga realisasi anggaran tidak selalu dapat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

Dalam Rangka Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah diperlukan perbaikan dan oprimalisasi kinerja antara lain:

1. Memperkuat keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari Renja hingga DPA, agar target dan alokasi anggaran lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan riil penanggulangan bencana.
2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan website resmi BPBD serta memastikan publikasi dokumen keuangan daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi anggaran, khususnya pada anggaran yang bersifat darurat dan responsif terhadap kejadian bencana, agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan akuntabel

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target dalam meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD tidak tercapai sehingga tidak terdapat efesiensi anggaran namun, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama di BPBD Kota Bogor yaitu dari pagu anggaran 3,672,382,414.00 terealisasi sebesar 3,521,141,889.00 sehingga tersisa pagu anggaran sebesar 151,240,525.00 dari jumlah total anggaran tersebut, dapat diketahui capaian anggran yang mendukung dalam peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor yakni 95.88%.

Tabel 3. 11

Sumber Anggaran Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5-1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,672,382,414.00	3,521,141,889.00	151,240,525.00	95.88
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,619,102,414.00	3,467,861,889.00	151,240,525.00	95.82
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53,280,000.00	53,280,000.00	0.00	100.00

Sumber : BPBD Kota Bogor

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan menunjukan kondisi yang kurang baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Akuntabilitas keuangan di BPBD Kota Bogor. Dilihat dari perspektif perencanaan, capaian Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, BPBD tahun 2025 kurang dari target akhir Rencana Strategis yaitu sebesar 72.74 % dari target akhir renstra sebesar 95 dan terealisasi 69.1 pada tahun 2025. Penjelasan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12
Hasil Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BPBD

Perangkat Daerah	Nilai Indikator					Nilai Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan (%)
	Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu (%)	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan (%)	Persentase kepatuhan anggaran (%)	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA (%)	Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah (%)	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.74	99.40	65.00	86.36	0.00	69.10

Sumber Data: BKAD Kota Bogor

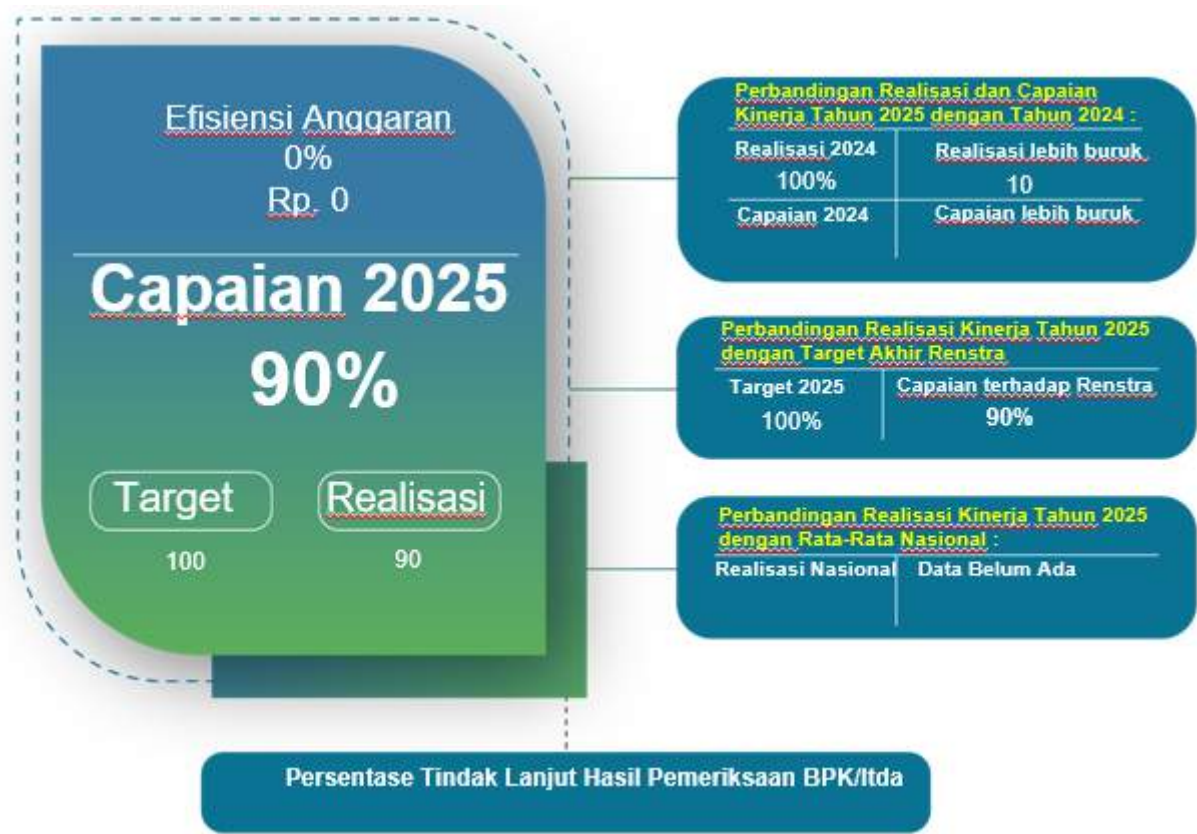
Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di
lingkup perangkat daerah

No	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
1.	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	N/A	100	94.74	94.74
2.	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di lingkup perangkat daerah	N/A	94	99.4	105.74
3.	Persentase kepatuhan penganggaran	N/A	100	65	65.00
4.	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	N/A	95	86.36	90.91
5.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	94	0	0

- Sasaran RPD: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif
- Sasaran Strategis PD : Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi yang handal (IK: Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda)

Gambar 3. 10
Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merujuk pada tingkat penyelesaian rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada instansi yang diperiksa. Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan selesai, terhadap total seluruh rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil pemeriksaan pada periode tertentu.

Indikator ini dipilih menjadi sasaran strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor karena mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penilaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. BPBD Kota Bogor ditargetkan memperoleh nilai 100 dengan capaian nilai sebesar 90. Kondisi ini menunjukkan masih adanya

kesenjangan antara target dan realisasi kinerja yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Adapun capaian Nilai Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida pada Tahun 2025 sebesar 90 % dari target 100%, dengan realisasi sebesar 90%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya percepatan dan penyempurnaan tindak lanjut agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan

Tabel 3. 14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

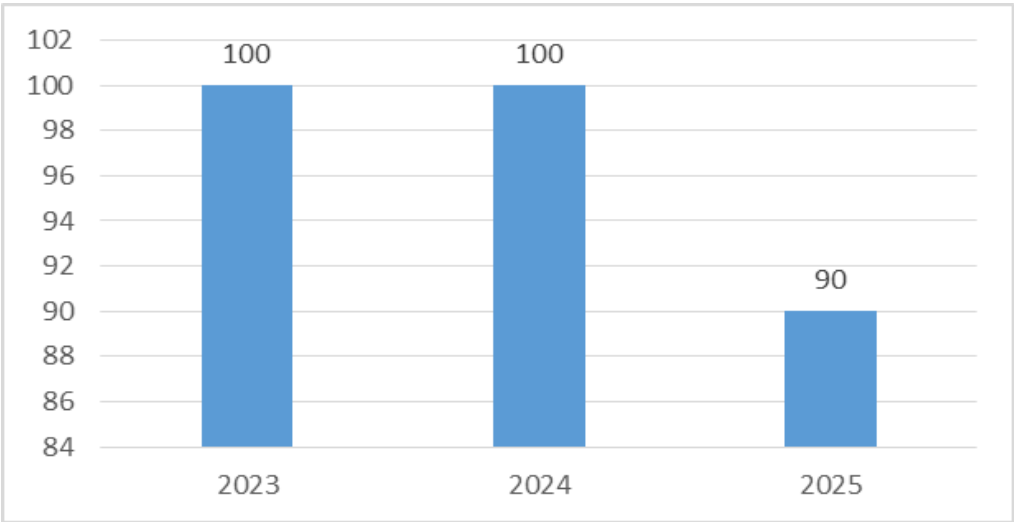
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91	100	100	100	90	90

Sumber : BPBD Kota Bogor

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3. 11
Tren Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa tren kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor belum dapat disandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Daerah merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode berjalan dan hanya dapat dilihat dari realisasinya saja karena merupa salah satu pendukung penilaian indeks reformasi birokrasi. Oleh karena itu, belum tersedia data historis yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk melihat perkembangan kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun berjalan ditetapkan sebagai baseline awal yang akan menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pada periode-periode selanjutnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 100.%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 90%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain;

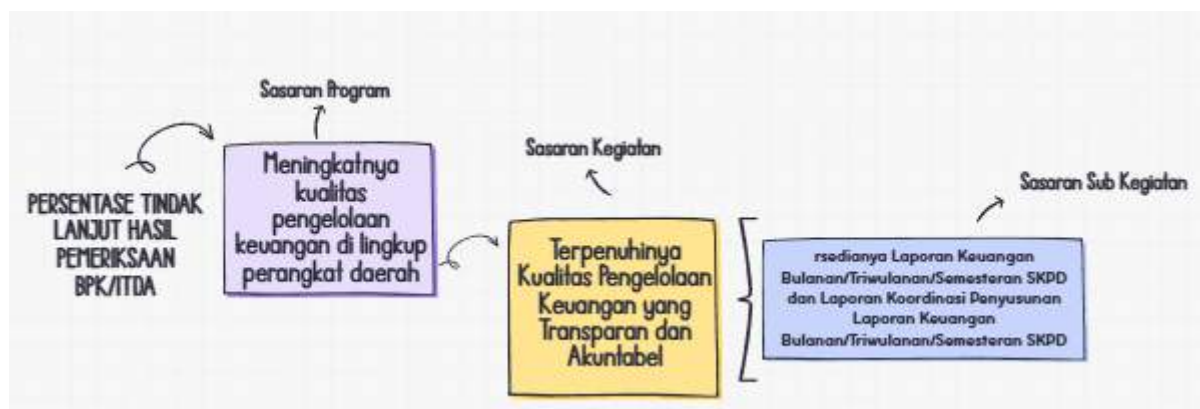
Karena indikator ini hanya diterapkan secara khusus di Kota Bogor dan tidak digunakan pada tingkat nasional, maka tidak tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap rata-rata nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan

Target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 90 dengan capaian 90% didukung oleh Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah dengan Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel serta terpenuhi Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di lingkup perangkat daerah, Persentase kepatuhan penganggaran, Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, adapula upaya yang telah dilaksanakan antara lain Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Berikut ini Faktor yang

mendukung Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada BPBD kota Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 12
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Pada tahun 2025 terdapat hasil rekapitulasi data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK RI perwakilan jawa barat tahun pemeriksaan 2016-2025 pada badan penanggulangan bencana daerah Kota Bogor. Dalam jenis pemeriksaan BPK tahun 2025 atas LKPD Kota Bogor TA 2024 terdapat 1 temuan dan 3 rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti 2 dan 1 belum ditindaklanjuti tetapi pada dasarnya temuan tersebut telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK berupa STS (Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah) melalui Bank BJB cabang Bogor pada tanggal 17 Mei 2025.

Namun demikian, pada capaian persentase masih tercatat 1 (satu) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga nilai tidak mencapai 100%. Secara substansi, rekomendasi tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan BPK. Akan tetapi, terjadi miskomunikasi dalam penyampaian Berita Acara dari BPBD Kota Bogor sehingga dokumen BA final tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) belum diperbarui dalam sistem pelaporan. Akibatnya, status penyelesaian belum tercatat secara administratif sebagai 100 namun disampaikan di BA hanya 80, meskipun secara faktual tindak lanjut telah dilaksanakan.

Dalam Rangka Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah diperlukan perbaikan dan oprimalisasi kinerja antara lain:

1. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyampaian dokumen tindak lanjut, termasuk Berita Acara dan dokumen pendukung lainnya, agar tidak terjadi keterlambatan pembaruan data dalam sistem pelaporan TLRHP.

2. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi internal secara berkala antara pejabat pengelola keuangan, PPTK, dan PA sebelum penyampaian laporan kepada pihak pemeriksa.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya dalam klarifikasi status tindak lanjut agar tidak terjadi perbedaan pencatatan administratif.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan pelaporan, agar data tindak lanjut terdokumentasi dengan baik, akurat.

f. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Target dalam meningkatkan Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Pada BPBD tidak tercapai sehingga tidak terdapat efesiensi anggaran namun, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama (IKU) di BPBD Kota Bogor yaitu dari pagu anggaran 53,280,000.00 terealisasi sebesar 53,280,000.00 sehingga tidak tersisa pagu anggaran, dapat diketahui capaian anggran yang mendukung dalam Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Pada BPBD Kota Bogor yakni 100.00%.

Tabel 3. 15
Sumber Anggaran Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53,280,000.00	53,280,000.00	0.00	100.00

Sumber : BPBD Kota Bogor

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun belum terealisasi secara sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti, tetapi masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum diselesaikan secara tuntas atau masih dalam proses

penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 16
Hasil Penilaian TLHP BPK RI dan APIP Tahun 2025

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI	80.00
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	100.00

Sumber Data: SURABI Jawa Barat

Hasil Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda diperoleh dari penggabungan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada Tahun 2025, capaian TLHP BPK RI sebesar 80%, sedangkan TLHP APIP mencapai 100%. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan kedua persentase tersebut ($80 + 100 = 180$), kemudian dibagi 2 sebagai nilai rata-rata, sehingga diperoleh hasil sebesar 90%. Dengan demikian, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah sebesar 90%.

Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Indikator Program dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah

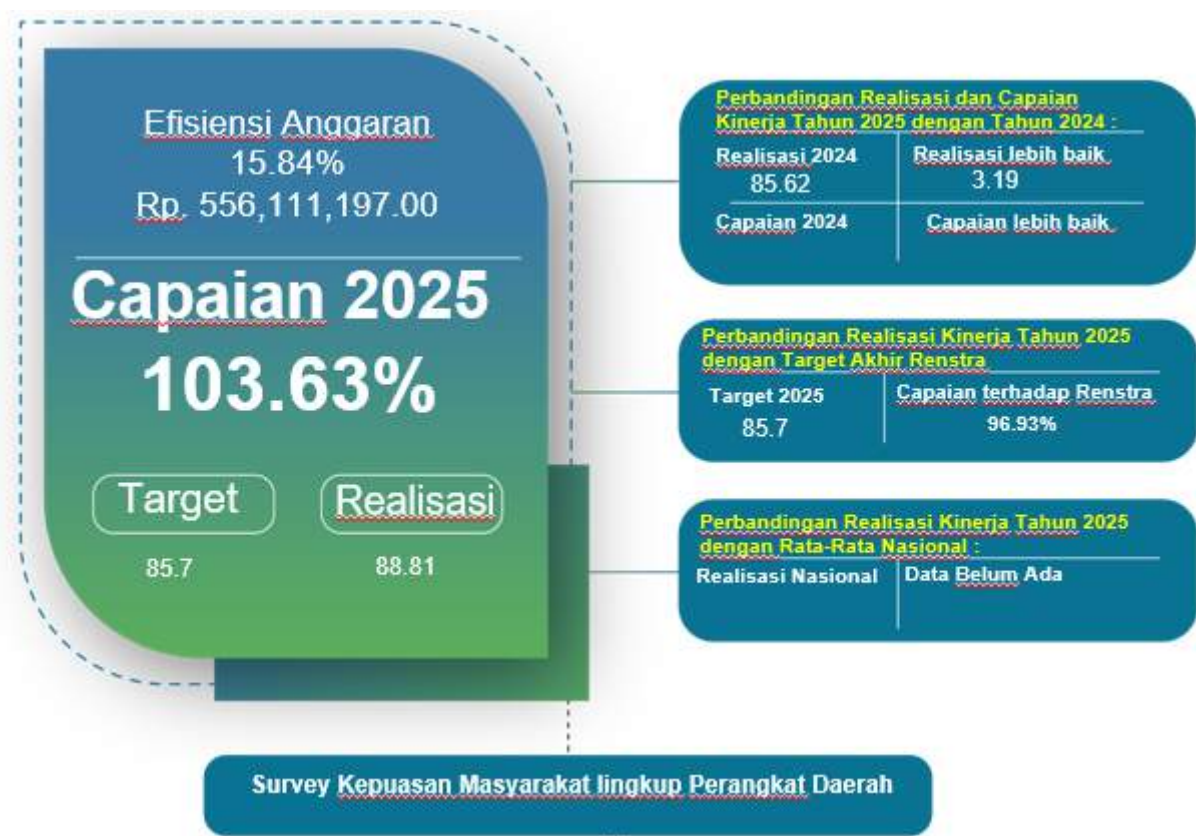
No	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
1.	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	N/A	100	94.74	94.74
2.	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di lingkup perangkat daerah	N/A	94	99.4	105.74
3.	Persentase kepatuhan penganggaran	N/A	100	65	65.00

4.	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	N/A	95	86.36	90.91
5.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	94	0	0

Sasaran RPD: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah (IK: Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah)

Gambar 3. 13
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat merupakan indikator penting yang diperoleh melalui pengukuran terhadap persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengukuran ini dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sebagai bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penilaian target kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. BPBD Kota Bogor berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 103,63 persen, dengan target yang ditetapkan sebesar 85,70 dan realisasi mencapai 88,81. Capaian tersebut menggambarkan bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

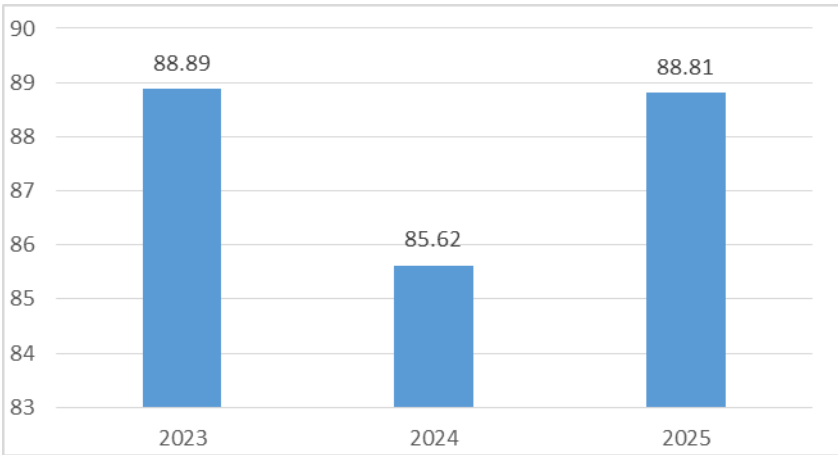
Tabel 3. 18
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Survey Kepuasan Masyarakat
Lingkup Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	
1	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75	85,70	88.81	103,63

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3. 14
Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah



Sumber Data: BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ‘lingkup Perangkat Daerah pada BPBD Kota Bogor menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya nilai SKM terealisasi sebesar 85,62, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 88,81. Dengan demikian, terjadi

kenaikan sebesar 3,19 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BPBD Kota Bogor. Namun demikian, peningkatan tersebut hanya dapat dibandingkan berdasarkan realisasi antar tahun dan belum dapat dihitung tingkat capaiannya terhadap target, karena pada periode sebelumnya indikator SKM belum ditetapkan sebagai target kinerja.

Peningkatan Nilai pada Survei Kepuasan Masyarakat BPBD Kota Bogor pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan secara efektif. Kenaikan nilai dari 85,62 pada tahun sebelumnya menjadi 88,81 mencerminkan semakin baiknya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan berdasarkan aspek pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator keberhasilan BPBD Kota Bogor dalam melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil SKM dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan standar pelayanan ke depan, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas pelayanan kebencanaan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah belum mencapai target akhir RPJMD/Renstra dengan perbandingan sebesar 96.93 %. Yaitu dari target akhir renstra sebesar 91.62 dan terealisasi 88,81.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain;

Karena indikator ini hanya diterapkan secara khusus di Kota Bogor dan tidak digunakan pada tingkat nasional, maka tidak tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap rata-rata nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan

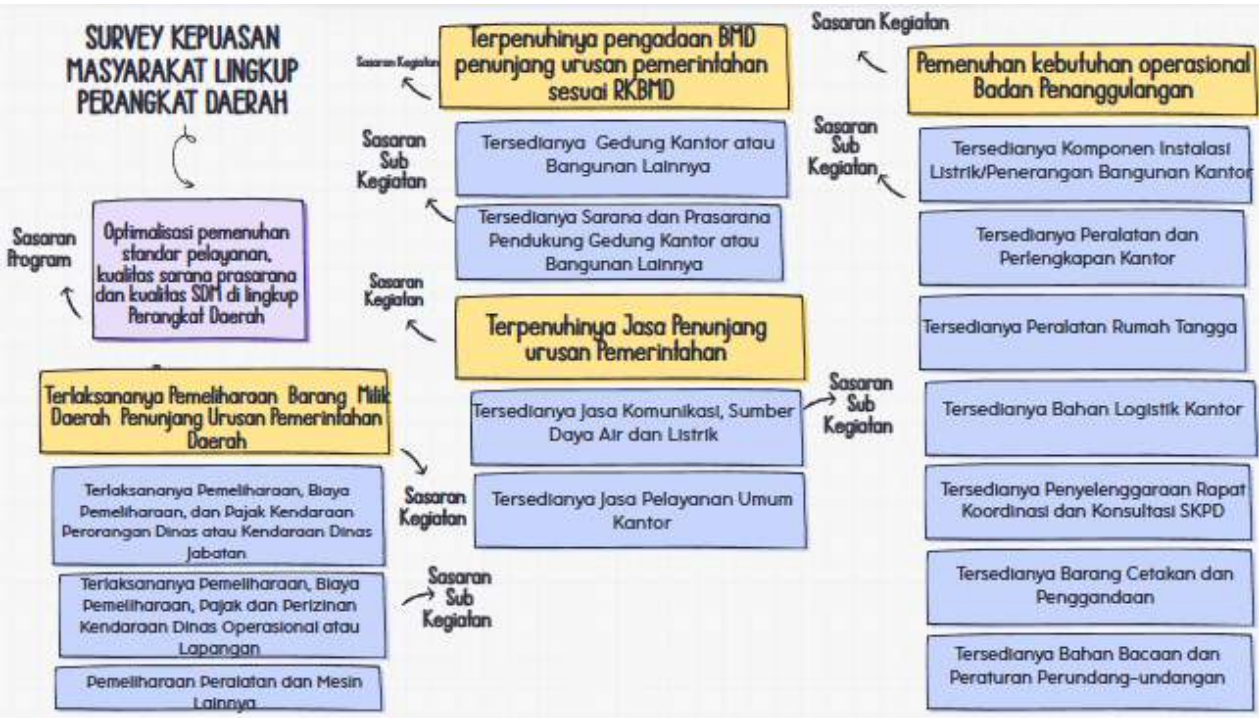
Keberhasilan peningkatan target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 88.81 dengan capaian 103,63 didukung oleh Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah yang didorong nilai Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana, Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan) dan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan). dan disebabkan karena Pemenuhan kebutuhan operasional Badan Penanggulangan karena Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selain itu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yakni pengadaan perlengkapan kantor berupa ATK, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor seperti belanja makanan dan minuman natura, Pakan Natura dan Mamin Lapangan, Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas, baik di dalam daerah maupun luar daerah (DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Jawa Barat).

Selain itu Keberhasilan peningkatan capaian Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah didukung oleh Terpenuhinya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD yang disebabkan oleh Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya seperti tenda pengungsi yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi selama masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dan aktivitas lapangan.

Dalam pemenuhan capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah berhasil tercapai karena Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan yang didukung oleh Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Perangkat Daerah, diperlukan terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah. Upaya tersebut didukung melalui terlaksananya pemeliharaan, pembiayaan pemeliharaan, serta pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, serta terlaksananya pemeliharaan,

pembiayaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Selanjutnya, dukungan juga diwujudkan melalui terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. berikut ini Faktor yang mendukung Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada BPBD kota Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 15
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah Pada BPBD Kota Bogor



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Gambar diatas diketahui faktor-faktor yang telah meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah Pada BPBD Kota Bogor, Capaian sasaran dalam Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah Pada BPBD Kota Bogor daerah dikudukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2025, indikator program yang mendukung Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah mencapai target. Kondisi ini disebabkan oleh terpenuhinya indikator program yakni Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan, dan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan karena.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi optimalisasi capaian indikator tersebut, antara lain penyesuaian prosedur pelayanan pada situasi kedaruratan bencana. Selain itu, tingginya intensitas kejadian bencana juga berdampak pada beban pelayanan dan kecepatan penanganan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana penyelamatan pada kondisi tertentu masih belum sepenuhnya memadai. Namun demikian, keterbatasan tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tingkat kepuasan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam Rangka Meningkatnya diperlukan perbaikan dan optimalisasi Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah antara lain:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, khususnya fasilitas pendukung dan peralatan operasional, guna menunjang kelancaran masyarakat dalam menerima layanan.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar aparatur memiliki kompetensi dan profesionalisme.
3. Penyempurnaan persyaratan dan prosedur pelayanan, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, serta didukung dengan kepastian waktu dan standar pelayanan yang konsisten.
4. Optimalisasi sistem penanganan pengaduan masyarakat, melalui peningkatan kecepatan respons, transparansi tindak lanjut, serta pemanfaatan media pengaduan yang mudah diakses.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi hasil SKM, sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Serta segera menindak lanjuti hasil evaluasi SKM.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target dalam meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah Pada BPBD telah tercapai, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama di BPBD Kota Bogor yaitu dari pagu anggaran 3,509,971,823.00 terealisasi sebesar 2,953,860,626.00 sehingga tersisa pagu anggaran sebesar 556,111,197.00 dari jumlah total anggaran tersebut, dapat diketahui capaian anggaran yang mendukung dalam peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor yakni 84.16%.

Tabel 3. 19
Sumber Anggaran Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kota Bogor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5-1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403,104,600.00	235,023,291.00	168,081,309.00	58.30
1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,908,400.00	6,069,260.00	3,839,140.00	61.25
1.05.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,581,500.00	28,376,718.00	12,204,782.00	69.93
1.05.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,270,000.00	12,688,100.00	8,581,900.00	59.65
1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166,130,600.00	128,040,500.00	38,090,100.00	77.07
1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,533,700.00	5,426,500.00	10,107,200.00	34.93
1.05.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,946,400.00	11,940,000.00	2,006,400.00	85.61
1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,734,000.00	42,482,213.00	93,251,787.00	31.30
5-1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296,718,200.00	294,246,489.00	2,471,711.00	99.17
1.05.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194,859,000.00	194,346,489.00	512,511.00	99.74
1.05.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101,859,200.00	99,900,000.00	1,959,200.00	98.08
5-1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,967,383,160.00	1,918,520,594.00	48,862,566.00	97.52
1.05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140,085,000.00	109,583,992.00	30,501,008.00	78.23
1.05.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,827,298,160.00	1,808,936,602.00	18,361,558.00	99.00
5-1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842,765,863.00	506,070,252.00	336,695,611.00	60.05
1.05.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,330,000.00	36,411,591.00	1,918,409.00	95.00
1.05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	657,245,361.00	356,740,401.00	300,504,960.00	54.28

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Indikator Program dalm Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah

No	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
1.	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	N/A	87.11	88.08	101.11
2.	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	N/A	88.75	89.1	100.39
3.	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	N/A	88.38	88.85	100.53
4.	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	N/A	88.38	88.73	100.40

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Sasaran RPD: Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana (IK: Indeks Risiko Bencana)

Gambar 3. 16
Indeks Risiko Bencana



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat potensi kerugian akibat bencana pada suatu wilayah dalam periode tertentu. IRB disusun dan digunakan secara nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana dan pembangunan berbasis risiko. Indikator ini menjadi Sasaran strategis dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana karena IRB menggambarkan secara

menyeluruh tingkat risiko bencana berdasarkan kondisi wilayah, penduduk, dan kapasitas pemerintah daerah.

Penilaian target kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. BPBD Kota Bogor berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 106,302 persen, dengan target yang ditetapkan sebesar 58.03 dan realisasi mencapai 54.59. Capaian tersebut menggambarkan bahwa rendahnya nilai IRB, semakin baik kondisi ketahanan suatu daerah terhadap bencana. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 21
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Indeks Risiko Bencana

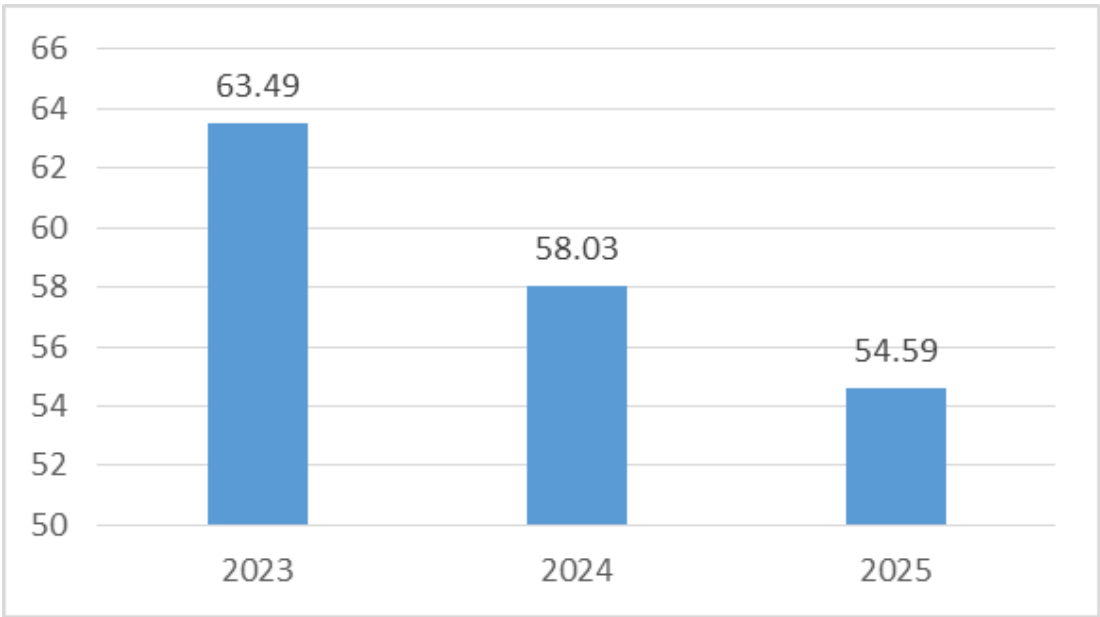
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	0,79	58.03	63.49	58,03	54.59	106,302

Sumber Data : BNPB

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 3. 17
Indeks Risiko Bencana



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Dapat disimpulkan bahwa tren Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Bogor menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya nilai IRB sebesar 58.03, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 54.59. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 3,44 poin, yang mencerminkan Keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam menurunkan tingkat risiko bencana melalui peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, pengurangan kerentanan masyarakat, serta penguatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Indeks Risiko Bencana tetap digunakan sebagai Indikator Tujuan dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 58,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 94.12%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)/provinsi/daerah lain;

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, realisasi Indeks Risiko Bencana menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 54.59, lebih rendah risikonua dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 106.02. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat oenurunan risikoa bencana di kota bogor relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Peningkatan nilai pada Indeks Risiko Bencana pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana telah berjalan secara efektif. Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana yang bersifat positif, dari 58,03 pada tahun sebelumnya menjadi 54,59, mencerminkan semakin baiknya kinerja BPBD Kota Bogor dalam meningkatkan kapasitas daerah, mengurangi tingkat kerentanan, serta memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Meskipun indikator Indeks Risiko Bencana tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya karena belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2024 dan seterusnya, namun secara substantif realisasi nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, yang menandakan meningkatnya ketahanan Kota Bogor terhadap risiko bencana.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang dilakukan

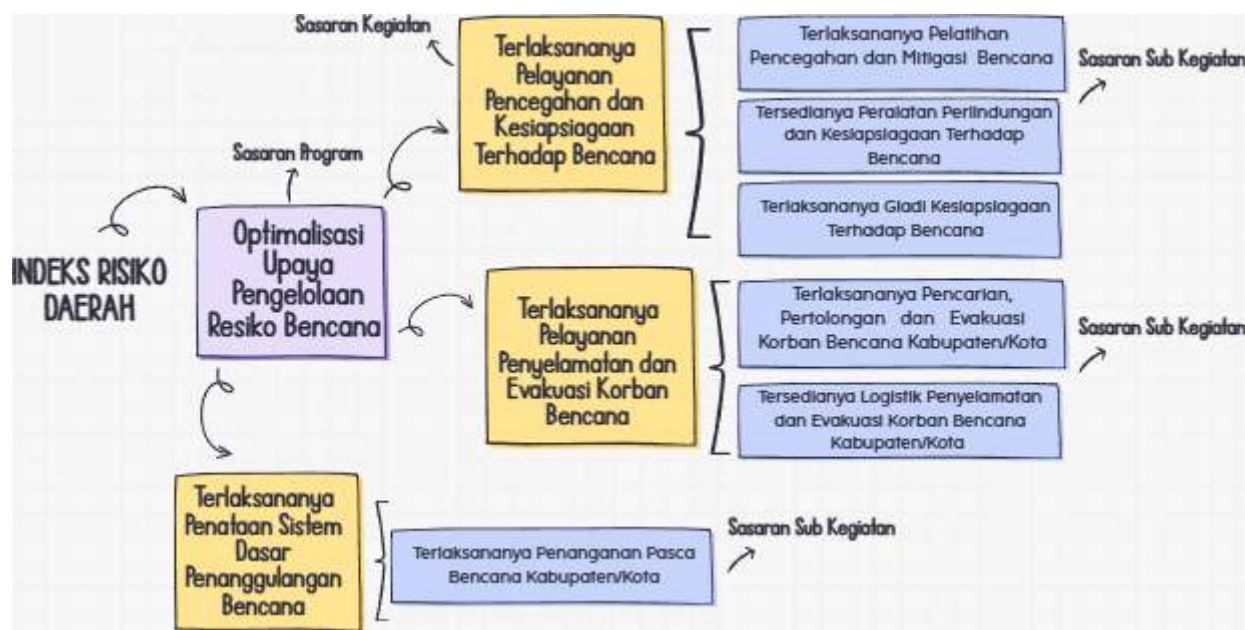
Keberhasilan peningkatan target kinerja di tahun 2025 yang terealisasi sejumlah 54,59, dengan capaian 106,302 didukung oleh Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko Bencana yang didorong oleh pemenuhan capaian indikator program yakni Persentase masyarakat tangguh bencana dan Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana. Pelayanan tersebut disebabkan oleh faktor Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang didukung oleh Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Indeks Risiko Bencana juga didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang disorong oleh Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pengadaan logistik yang disediakan untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana, hal itu terdiri dari terpal sebanyak 210 lembar serta penyediaan hunian sementara (hunian sementara) sebanyak 280 dalam 1 (satu) tahun untuk korban bencana di Kota Bogor dan disalurkan oleh 87 KK yang rumahnya terdampak akibat bencana.

Berdasarkan paragraf diatas terdapat pula unsur yang mendukung capaian IKU tersebut yakni Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang didukung oleh Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota yakni yang menghasilkan sebuah kajian kebutuhan pasca bencana atau disebut dengan JITUPASNA yang dihasilkan melalui layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik serta melakukan wadah koordinasi multipihak agar mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, penurunan risiko bencana juga sangat didorong oleh peningkatan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang memiliki 7 prioritas fokus utama yang terdiri dari 71 indikator dan 284 pertanyaan kunci. Peningkatan nilai IKD tersebut menunjukkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap penurunan nilai Indeks Risiko Bencana. Dengan demikian, capaian indikator-indikator tersebut menjadi faktor pendukung utama dalam menurunkan tingkat risiko bencana di daerah.

Gambar 3. 18

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan Indeks Risiko Bencana



Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Gambar diatas diketahui faktor-faktor yang telah meningkatkan Indeks Risiko Bencana Kota Bogor. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi optimalisasi capaian indikator tersebut, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan, masih terdapat hambatan dalam proses pengadministrasian permohonan logistik yang menyebabkan keterlambatan penyaluran, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis kebencanaan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah, serta tingginya frekuensi dan sebaran kejadian bencana yang bersifat tidak terduga sehingga memengaruhi perencanaan dan distribusi logistik secara tepat waktu serta target pada indikator terlalu rendah terhadap kondisi real kinerja pada BPBD Kota Bogor.

Dalam Rangka Meningkatnya diperlukan perbaikan dan oprimalisasi Indeks Risiko Bencana Daerah antara lain:

1. Perbaikan sistem pengadministrasian logistik, dengan menyederhanakan alur permohonan serta mempercepat proses verifikasi dan penyaluran logistik agar

lebih efektif dan tepat waktu serta memperbaiki evaluasi SOP penyediaan logistik.

- 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya petugas kebencanaan, melalui pelatihan teknis, simulasi, dan peningkatan pemahaman standar operasional penanggulangan bencana.
- 3. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah, guna memastikan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan bencana.
- 4. Penguatan perencanaan berbasis data dan risiko bencana.
- 5. Peningkatan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat, melalui penguatan program Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana secara berkelanjutan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target pada Indeks Risiko Bencana telah tercapai, adapun sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan indikator kinerja utama (IKU) di BPBD Kota Bogor yaitu dari pagu anggaran 1,964,198,200.00 terealisasi sebesar 1,428,328,700.00 sehingga tersisa pagu anggaran sebesar 535,869,500.00 dari jumlah total anggaran tersebut, dapat diketahui capaian anggran yang mendukung dalam peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pada BPBD Kota Bogor yakni 72.72%.

Tabel 3. 22
Sumber Anggaran Indeks Risiko Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran	Capaian
1	1	2	3	4	5
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5-1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,036,386,200.00	977,635,200.00	58,751,000.00	94.33
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	701,879,300.00	677,482,200.00	24,397,100.00	96.52
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	9,339,300.00	8,584,500.00	754,800.00	91.92
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	325,167,600.00	291,568,500.00	33,599,100.00	89.67
5-1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	857,816,000.00	387,087,000.00	470,729,000.00	45.12
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00	24,600,000.00	25,400,000.00	49.20

1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	807,816,000.00	362,487,000.00	445,329,000.00	44.87
5-1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	69,996,000.00	63,606,500.00	6,389,500.00	90.87
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	69,996,000.00	63,606,500.00	6,389,500.00	90.87

Sumber : BPBD Kota Bogor

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian sasaran dalam Meningkatnya kualitas Indeks Risiko Bencana Kota Bogor daerah didukung oleh program Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 23
Indikator Program dalam Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko Bencana

No	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
1.	Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	N/A	20	100	500
2.	Persentase Masyarakat Tangguh Bencana	N/A	5	39,7	794

Pada tahun 2025, indikator program yang mendukung Indeks Risiko Bencana mencapai target. Kondisi ini disebabkan oleh terpenuhinya indikator program yakni Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana, dan Persentase Masyarakat Tangguh Bencana.

ANALISIS EFESIENSI ATAS PENGGUNA SUMBERDAYA

Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana mencakup dua aspek utama, yaitu efisiensi biaya dan efisiensi sumber daya manusia. Efisiensi biaya menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi sumber daya manusia mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola tenaga kerja secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Perhitungan efisiensi tersebut diterapkan pada anggaran yang ditujukan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bogor sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung penurunan risiko bencana di daerah dan akutabilitas kinerja bpbd Kota Bogor dapat diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Persentase Efisiensi Baiya = **100% -**
$$\frac{\text{Rrealisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 7,905,375,215.00. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung keseluruhan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp 9,153,552,437.00

Apabila dilakukan perhitungan menggunakan rumus efisiensi sumber daya biaya, terlihat bahwa terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan yang benar-benar digunakan. Selisih tersebut menunjukkan adanya penghematan belanja perangkat daerah. Hasil perhitungan ini memberikan nilai efisiensi sebesar 13.64, yang jika dikonversikan ke nilai rupiah menunjukkan bahwa BPBD Kota Bogor mampu melakukan efisiensi atau penghematan biaya sekitar Rp 1,248,177,222.00 selama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025.

Tabel 3. 24
Akuntabilitas Keuangan Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Sasarab Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Selisih	Capaian anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.20
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	53,280,000.00	53,280,000.00	0	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	3,672,382,414.00	3,521,141,889.00	151,240,525.00	95.88

Keuangan Perangkat Daerah					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100)	7,000,000.00	2,044,000.00	4,956,000.00	29.20
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	3,509,971,823.00	2,953,860,626.00	556,111,197.00	84.16
Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	1,964,198,200.00	1,428,328,700.00	535,869,500.00	72.72

Selanjutnya Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 6 Indikator sasaran terdapat 4 Indikator sasaran capaian kinerjanya yang tidak mencapai target, berikut ini rinciannya

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah melalui indikator “Kepatuhan Pengeloaan Keuangan” dengan capaian 72,74% dan efesiensi anggaran 4.12%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah melalui indikator “Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100)” tidak tercapai dengan Capian 0 dan efesiensi anggaran 70.80%
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui indikator “Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah” telah tercapai sebesar 97,18 dengan efesiensi anggaran 70.80%
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida” dengan capaian kinerja 90.00% dan efesiensi anggaran 00.00%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Berikut disajikan gambaran Akuntabilitas Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Uraian yang lebih rinci terkait perencanaan, realisasi, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3. 25
Akuntabilitas Keuangan BPBD Kota Bogor Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	6	7 = 6 - 3	$\frac{8}{3} = 6$
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	8.794.719.237,00	7.551.188.726,00	(1.243.530.511,00)	85,86
5.1.01	Belanja Pegawai	3.619.102.414,00	3.467.861.889,00	(151.240.525,00)	95,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.175.616.823,00	4.083.326.837,00	(1.092.289.986,00)	78,90
5.2	BELANJA MODAL	358.833.200,00	354.186.489,00	(4.646.711,00)	98,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.974.200,00	159.840.000,00	(4.134.200,00)	97,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.859.000,00	194.346.489,00	(512.511,00)	99,74
	JUMLAH BELANJA DAERAH	9.153.552.437,00	7.905.375.215,00	(1.248.177.222,00)	86,36
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.153.552.437,00)	(7.905.375.215,00)	1.248.177.222,00	86,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.153.552.437,00)	(7.905.375.215,00)	1.248.177.222,00	86,36

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian anggaran tiap Sasaran Indikator Kinerja Utama pada BPBD Kota Bogor, dan diketahui pada tahun 2025 capaian keseluruhan anggran pada BPBD Kota Bogor sebesar 86.36%. Untuk melihat

perbandingan akuntabilitas anggaran antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, dapat melihat tabel berikut.

Tabel 3. 26
Akuntabilitas Keuangan BPBD Kota Bogor

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2022	9.340.027.122,00	8.290.874.493,00	88,77
2023	8.614.146.490.00	8.190.941.344.00	95.09
2024	9.133.247.387.00	8.518.977.715.00	93.27
2025	9,153,552,437.00	7,905,375,215.00	86.36

Sumber Data : BPBD Kota Bogor

Dari tabel di atas terlihat bahwa, capaian anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dari tahun 2023 sampai 2024 cenderung mendekati capaian lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2025 yang memiliki banyak penurunan berikut ini faktor Penurunan capaian anggaran BPBD Kota Bogor Tahun 2025:

1. Karakteristik anggaran BPBD yang bersifat kontinjensi, di mana penyerapan anggaran sangat bergantung pada tingkat kejadian dan dampak bencana yang terjadi pada tahun berjalan.
2. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran SKPD, penyerapan anggaran tidak optimal karena pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada undangan rapat dan koordinasi dari instansi terkait.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi selama Tahun 2025. Dokumen ini memuat gambaran capaian kinerja yang dilaksanakan berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025–2026 serta Rencana Kerja BPBD Kota Bogor Tahun 2025.

4.1 Kesimpulan

Sasaran Startegis yang telah dicapai oleh target indikator yang telah ditetapkan sudah diukur dan dievaluasi seperti yang telah dipaparkan oleh laporan ini. Pencapaian tersebut diperoleh melalui perbandingan antara hasil yang tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Utama. Pada tahun 2025 terdapat 6 Indikator kinerja Utama yang terdapat pada program penanggulangan bencana dan program penunjang, berikut target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah dari target 85.7 terdapat realisasi 88.81 sehingga capaian indikator tersebut mencapai 103,63%
2. Kepatuhan Pengeloan Keuangan dari target 95 terealisasi sebesar 69.1 sehingga capaian kinerja pada Kepatuhan Pengeloan Keuangan adalah 72,74%
3. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan > 100) Dari target 1 terdapat realisasi 0 atau tidak tercapai.
4. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dari target 83.2 terdapat realisasi 80.85 sehingga capaian indikator tersebut mencapai 97,18%
5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida dari target 100 terdapat realisasi 90 sehingga capaian indikator tersebut mencapai 90.00%
6. Indeks Resiko Bencana dari target 58.03 terdapat realisasi 54.59 sehingga capaian indikator tersebut mencapai 106,03%

Pada tahun 2025 terdapat 4 Indikator Kinerja Utama pada BPBD Kota Bogor, yang tidak mencapai target berikut penyebab indikator sasaran yang tidak tercapai targetnya sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Realisasi Anggaran terhadap DPA disebabkan oleh karakteristik anggaran BPBD yang diperuntukan untuk hal yang mendesak dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kejadian bencana serta tidak dapat diaksesnya website BPBD Kota Bogor, adanya kendala teknis pada sistem website BPBD Akibatnya, publikasi dokumen keuangan daerah tidak dapat dilakukan selain itu ketidak sesuaian antara program dalam RKPD dengan PPAS dan tidak sesuainya program KUA-PPAS dengan APBD.
2. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah tidak tercapaia karena target kinerja perencanaan belum seluruhnya dapat dicapai, setiap seksi belum sepenuhnya memahami serta memiliki kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian, serta rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100) tidak mencapai target hal ini karena disebabkan tidak memenuhi Indikator inovasi, anantara lain yang tidak tersedia yakni Regulasi Inovasi Daerah, Replikasi, Pedoman Teknis, Pelaksana Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Layanan Terintegrasi, Kecepatan penciptaan inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah.
4. Terjadi miskomunikasi dalam penyampaian Berita Acara dari BPBD Kota Bogor sehingga dokumen BA final tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) belum diperbarui dalam sistem pelaporan. Akibatnya, status penyelesaian belum tercatat secara administratif sebagai 100 namun disampaikan di BA hanya 80, meskipun secara faktual tindak lanjut telah dilaksanakan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran terkait pelaksanaan pada tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem website
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis terkait perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta Mendorong setiap seksi agar lebih memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
3. Melengkapi dokumen pendukung inovasi seperti pedoman teknis, SK penetapan pelaksana inovasi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi pada inovasi yang didorong.
4. Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum diinput ke dalam sistem pelaporan agar tidak terjadi perbedaan antara kondisi faktual dan administrative serta Menetapkan mekanisme kontrol dan monitoring berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) hingga tercatat 100%

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025 kami sampaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama terhadap pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Selain itu, laporan ini diharapkan pula dapat menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang lebih efektif dan terarah pada tahun anggaran berikutnya, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal.